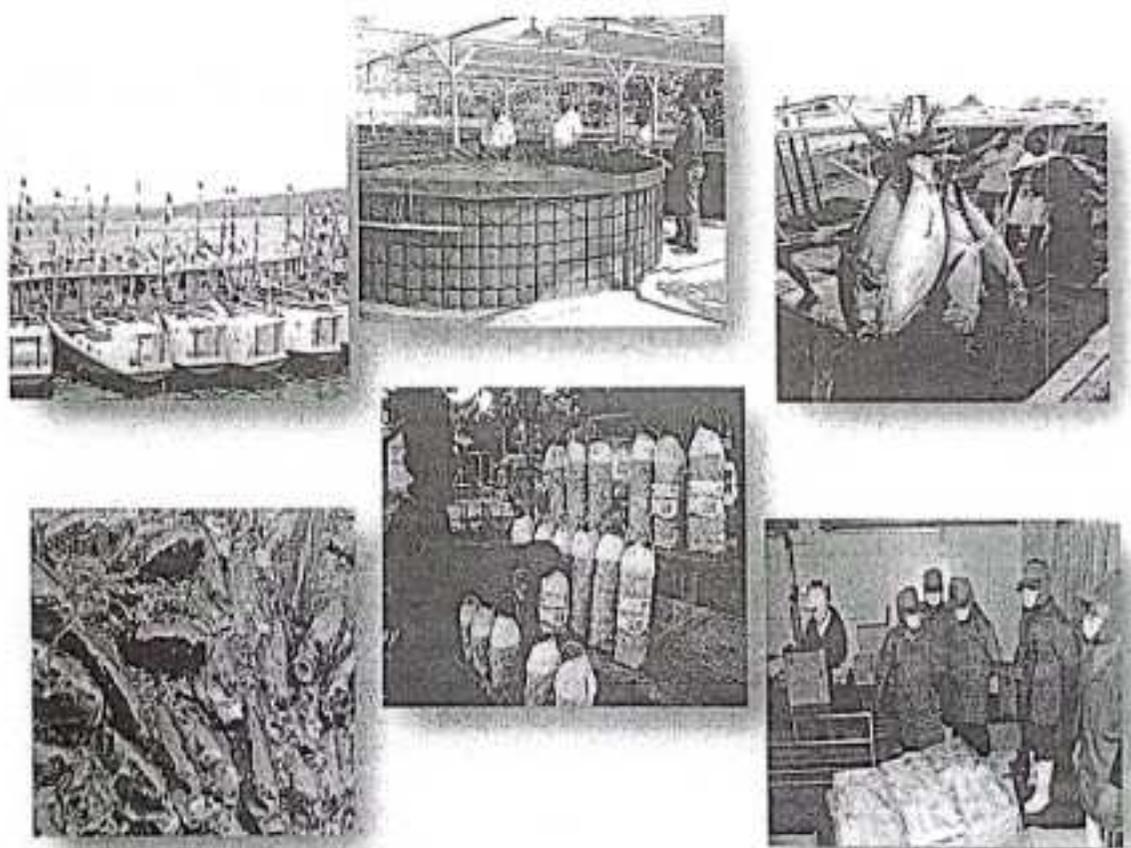


**LAPORAN KINERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka melakukan pertanggung jawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya (DPPA) selama kurun waktu satu tahun.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka tahun 2024 berisi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, selain itu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Sikka di tahun mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Harapan kami laporan ini bermanfaat dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan pada masa yang akan datang.

Maumere, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sikka, *



Paulus H. Bangkor, S.Pi.M.Pi

Pembina Utama Muda
NIP. 19660628 199703 1 005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka melakukan pertanggung jawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka tahun 2024 berisi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka. Berbagai capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan menggambarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sikka 2024-2026. Tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkannya kontribusi dan pertumbuhan sektor Perikanan dalam PDRB dengan sasarannya Meningkatnya produksi perikanan.

Kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut : Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mengelola anggaran sebesar Rp. 18.212.481.189,98, yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp. 2.956.669.779 realisasi mencapai 81,64% dan Belanja barang & jasa sebesar Rp. 13.660.999.411 dan realisasi mencapai 94,64%, Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebesar Rp. 1.215.123.180 dari target sebesar Rp. 3.000.000.000 atau mencapai 340,50%, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 11,31 dari target 12,03, produksi perikanan dengan target 26.151,54 ton dan terealisasi 27.625,41 ton dengan perbandingan capaian 105,64%, nilai produksi perikanan terealisasi sebesar Rp. 409.616.208.936,36 dari target sebesar Rp. 397.872.397.825, pendapatan nelayan dengan target sebesar Rp. 19.561.082 dan terealisasi sebesar Rp. 20.138.456,68, Tingkat konsumsi ikan terealisasi 79,57 melebihi target 76,61 dengan angka perbandingan capaian 103,86%, Indeks kepuasan masyarakat dengan target 2,70 dan terealisasi 3,69 dengan perbandingan capaian 136,67%, Indeks profesionalitas ASN target 75 dan terealisasi 92,01 dengan angka perbandingan 122,68%, Indeks sarana dan prasarana terealisasi 0,85 dari target



1,25 dengan angka perbandingan 68%. Beberapa keberhasilan / kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang terjadi selama tahun anggaran 2024 yakni untuk keberhasilan / peningkatan antara lain, Semua kegiatan fisik pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran specific grand dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dianggarkan dalam DPA 2024 dan DPPA 2024 semua terlaksana dan terealisasi 100%, Untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolahan berjalan sesuai dengan ketersediaan anggaran karena merupakan bagian dari anggaran specific grand, 7 indikator kinerja utama dari 8 indikator kinerja utama dinas perikanan terlaksana mendekati dan melebihi target yang ditetapkan, Kerjasama dengan Pelaku usaha di sektor perikanan terus mengalami peningkatan baik perorangan maupun yang berbadan hukum. Untuk kegagalan / penurunan antara Kegiatan yang bersumber pada anggaran block grand tidak semua dapat terlaksana., Pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target yang ditetapkan yakni retribusi penjualan produk usaha daerah berupa penjualan es balok dari pabrik es Alok, Paga dan Nangahale karena operasional 3 pabrik es mengalami kerusakan, SDM aparatur pada Dinas Perikanan masih terbatas karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan pelatihan teknis di bidang perikanan, Pembinaan nelayan dan pembudidaya masih terbatas karena jumlah aparatur yang masih terbatas pula. Sedangkan alternatif solusi Perbaikan mesin pabrik es sehingga dapat kembali dioperasikan untuk menghasilkan PAD dari retribusi penjualan produksi usaha daerah, Mencari sumber anggaran dari pusat untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat membantu pelaku usaha di bidang perikanan, Memberikan informasi peluang investasi kepada pelaku usaha di sektor perikanan.

Maumere, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sikka, *✍*

PAULUS H. BANGKUR.S.PI.,M.PI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660628 199703 1 005



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	24
Bab IV PENUTUP	30
1. Kesimpulan	30
2. Saran	31
Lampiran	32



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Keadaan SumberDaya Pegawai Per Bidang	3
1.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	3
1.3. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	4
1.4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	4
1.5. Keadaan Pegawai Menurut Golongan	4
2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2024	10
2.2 Rincian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Program & Anggaran	11
3.1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	13
3.2. Analisis Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2023	15
3.3. Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah	17
3.4. Analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	19
3.5. Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja	22
3.6. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Tahun 2024	35
2. Perubahan Pohon Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	36
3. Perubahan Cascading Tahun 2023 dan Tahun 2024	37
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	38
5. Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2024	39
6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	40
7. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023	41
8. Penghargaan – penghargaan yang diperoleh baik Lokal /Nasional/ Internasional Tahun 2023	42



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang perikanan di Kabupaten Sikka perlu melakukan pertanggung jawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi, antara lain :

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Perikanan mempunyai tugas tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja Dinas
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pembinaan mutu dan perijinan serta kelompok fungsional



5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pembinaan mutu dan perijinan dan kelompok fungsional
6. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka yakni sumber daya manusia sangat menentukan dan dipandang sebagai faktor strategis yang sangat menentukan dalam merealisasikan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang diimplementasikan dalam 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan selama tahun anggaran 2024. Sumber daya manusia sangat menentukan dan memberikan kontribusi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui orientasi fungsional, bukan lagi pengawasan, pengarah dan pengendalian saja, tetapi sudah pengembangan, kreativitas, fleksibilitas dan manajemen pro aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa aspek strategis organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka dapat mengelola berbagai program dan kegiatan melalui penggunaan berbagai input untuk menghasilkan berbagai output yang bermanfaat bagi organisasi. Mengelola sumber daya manusia dengan memberdayakan, mengembangkan, mempertahankan sumber daya manusia agar mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, strategi yang diterapkan dalam implementasi berbagai program dan kegiatan yaitu menempatkan sumber daya manusia (PPK, pengelola keuangan dan pengelola administrasi) untuk pelayanan masyarakat dengan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Peranan sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Tahun Anggaran 2024, sumber daya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Sikka yang mendukung implementasi strategis berbagai program dan kegiatan terdiri dari sumberdaya manusia perikanan yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional dan sumberdaya manusia yang melekat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sekretariat, bidang-bidang teknis dan seksi-seksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sumber daya Dinas Perikanan Kabupaten Sikka dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi :



Tabel 1.1
Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang

No	BAGIAN	JUMLAH PNS	PPPK
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretariat	9	-
3	Bidang Perikanan Budidaya	5	1
4	Bidang Perikanan Tangkap	6	2
5	Bidang Pembinaan Mutu & Perijinan	5	2
	JUMLAH	26	5

Dari jumlah pegawai yang ada, dikelompokan sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Data pegawai menurut pendidikan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	1	3,22
3.	S.1	22	70,97
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	1	3,22
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	5	16,13
9.	SLTP	2	6,45
10.	SD	-	-
	Jumlah	31	100

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 6 (enam) orang. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan / Eselon	Golongan				Jumlah	Ket
		I	II	III	IV		
1.	Struktural :						
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	-	-	-	1	1	
	- Eselon III	-	-	-	4	4	
	- Eselon IV	-	-	1	-	1	
2.	JFT	-	-	8	-	8	
3.	PPPK	-	-	5	-	5	
4.	Staf	2	4	6	-	12	
5.	Tenaga honorer	-	-	-	-	39	
Jumlah		2	4	20	5	70	

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 31 orang yaitu 22 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	22	70,97
2.	Perempuan	9	29,03
Jumlah		31	100

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sikka ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 1.5.
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	2	6,45
2.	Golongan II	4	12,90
3.	Golongan III	20	64,51
4.	Golongan IV	5	16,12
Jumlah		31	100,00

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan sebagai berikut:

- (1) Dinas Perikanan merupakan Tipe B yang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, sebagai berikut :





D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Untuk mencapai sasaran dan kinerja dinas, maka program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 5 kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yakni :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yakni :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yakni :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yakni :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yakni :



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.
- Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari 1 kegiatan yakni :
1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Daerah, dengan 1 sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
- Program pengelolaan perikanan budidaya terdiri dari 1 kegiatan yakni :
1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan 1 sub kegiatan
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
- IV. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari 1 kegiatan yakni :
1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 1 sub kegiatan yakni :
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota



E. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2023, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I : Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;
- B. Aspek Strategis Organisasi;
- C. Struktur Organisasi;
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;
- E. Sistematika Penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat Rencana Strategis dan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran

Lampiran :

- a. Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024;
- d. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- e. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- f. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024;
- g. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024;
- h. Penghargaan-penghargaan baik lokal / nasional / internasional, adipura.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Perikanan Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dan terintegrasi dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

A. Rencana Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Dari hasil telaahan terhadap tugas dan fungsi serta hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Perikanan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sikka yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Sikka. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. sedangkan tujuan meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada dinas perikanan Kabupaten Sikka dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat, Indeks profesionalitas ASN dan indeks kualitas pelayanan publik Dinas Perikanan.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka maka ditetapkan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan, Meningkatnya profesionalitas ASN dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan Publik.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan memuat tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif yang nantinya akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Perikanan menetapkan 6 strategi dan 1 arah kebijakan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan.

1. Memanfaatkan regulasi dibidang perikanan untuk meningkatkan pengelolaan SDI, ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha, memperluas peluang pasar serta pemanfaatan teknologi perikanan dan meningkatkan investasi serta mencegah ilegal fishing.



2. Memanfaatkan Grand design bidang perikanan untuk pengembangan potensi SDI, peningkatan produksi perikanan dan investasi bidang perikanan.
3. Memanfaatkan data base perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
4. Meningkatkan SDM aparatur dan pengembangan perikanan terpadu serta peningkatan sarana dan prasarana dibidang perikanan melalui program untuk mencegah ilegal fishing, Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum disektor perikanan untuk mencegah ilegal fishing.
5. Mengembangkan perikanan terpadu untuk menarik minat investasi di bidang perikanan.
6. Meningkatkan kemitraan, koordinasi dan komunikasi antar lembaga/instansi, penguatan teknologi perikanan untuk memanfaatkan potensi SDI dan peluang pasar, mencegah konflik kepentingan SDI.

Sedangkan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan adalah Memanfaatkan regulasi dibidang perikanan, grand design, data base perikanan serta menjalin kemitraan, koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDI, ketrampilan SDM aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha, sarana dan prasarana perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan, memperluas peluang pasar dengan memanfaatkan teknologi perikanan serta meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum untuk mencegah ilegal fishing.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ada 8 indikator kinerja utama Dinas Perikanan tahun 2024 dengan target yang ditetapkan yang menjadi acuan untuk penilaian sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan selama 1 tahun anggaran.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2024

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	12,03
		Produksi perikanan	Ton/Tahun	26.151,94
		Nilai produksi perikanan tangkap	Rupiah	397.872.397.825
		Pendapatan nelayan	Rupiah	19.561.082
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	76,61
2.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	2,70



		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Indeks	1,25

Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas perikanan tahun 2024 meliputi 3 sasaran yakni meningkatnya Produksi Perikanan, meningkatnya profesionalitas ASN dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Sikka. Untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dicapai melalui 5 indikator kinerja yakni kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dengan target 12,03%, produksi perikanan dengan target Rp. 26,151.94, nilai produksi perikanan dengan target Rp. 397.872.397.825, pendapatan nelayan dengan target Rp. 19.561.082 dan tingkat konsumsi ikan dengan target 76,61.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya profesionalitas ASN dicapai melalui 2 indikator kinerja yakni indeks kepuasan masyarakat dengan target 2,70 dan Indeks profesionalitas ASN dengan target 75. Sedangkan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dicapai dengan indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik dengan target 1,25

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.2.
Rincian Perjanjian Kinerja berdasarkan Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	a. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	12,03	a. Program pengelolaan perikanan tangkap	10.725.031.499
		b. Produksi perikanan	Ton /Tahun	26.151,94	b. Program pengelolaan perikanan budidaya	309.398.400
		c. Nilai produksi perikanan	Rupiah	397.872.397.825	c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.881.344.700
		d. Pendapatan nelayan	Rupiah	19.561.082		
		e. Tingkat konsumsi ikan	kg perkapita pertahun	76,61		
2.	Meningkatnya profesionalitas ASN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	2,70	a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.296.706.590,98
		b. Indeks Profesionalitas	Indeks	75		



		ASN				
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	a. Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Indeks	1,25		

Perjanjian kinerja dinas perikanan tahun 2024 didukung dengan 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 18.212.481.189,98 meliputi 3 program yang mendukung sasaran meningkatnya Produksi Perikanan yakni program pengelolaan perikanan tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 10.725.031.499, program pengelolaan perikanan budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 309.398.400 dan program pengolahan dan pemasaran hasil dengan anggaran sebesar Rp. 1.881.344.700. Dengan 3 program ini diharapkan mampu mencapai target dari masing-masing indikator yakni kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dengan target 12,03%, produksi perikanan dengan target Rp.26,151.94, nilai produksi perikanan dengan target Rp. 397.872.397.825, pendapatan nelayan dengan target Rp. 19.561.082 dan tingkat konsumsi ikan dengan target 76,61.

Untuk program penunjang urusan pemerintahan dengan besaran anggaran Rp. 5.296.706.590,98 ditunjukkan pada pencapaian sasaran meningkatnya profesionalitas ASN melalui 2 Indikator kinerja yakni indeks indeks kepuasan masyarakat dengan target 2,70 dan indeks profesionalitas ASN dengan target 75. Sedangkan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dicapai dengan indikator indeks sarana dan prasarana pelayanan publik dengan target 1,25



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2024. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Dinas Perikanan, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	12,03	11,31	94,01%
2.	Produksi perikanan	Ton	26.151,54	27.625,41	105,64%
3.	Nilai Produk Perikanan	Rupiah	397.872.397.825	409.616.208.936,36	102,95%
4.	Pendapatan Nelayan	Rupiah	19.561.082	20.138.456,68	102,95%
5.	Tingkat konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun	76,61	79,57	103,86%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	2,70	3,69	136,67%
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	92,01	122,68%
8.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Indeks	1,25	0,85	68%

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 11,31 dari target 12,03 sehingga perbandingan capaiannya 94,01%. Produksi perikanan terealisasi 27.625,41 ton dari target 26.151,54 ton dengan perbandingan capaian 105,64%.



Nilai produksi perikanan terealisasi sebesar Rp.409.616.208.936,36 dari target sebesar Rp.397.872.397.825 sehingga angka perbandingan capaian menjadi 102,95%. Pendapatan nelayan dengan target sebesar Rp.19.561.082 dan terealisasi sebesar Rp. 20.138.456,68 dengan angka perbandingan capaian 102,95%. Tingkat konsumsi ikan terealisasi 79,57 melebihi target 76,61 dengan angka perbandingan capaian 103,86%. Indeks kepuasan masyarakat terealisasi 3,69 dari target 2,70 dengan capaian 136,67%. Indeks profesionalitas ASN target 75 dan terealisasi 92,01 dengan angka capaian 122,68%. Indeks sarana dan prasarana terealisasi 0,85 dari target 1,25 dengan angka capaian 68%.



2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2.
Analisis Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2023		
			Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	11,00	11,31	102,01%	11,00	10,31	93,71
2.	Produkt perikanan	Ton	26.151,54	27.615,41	105,59%	23.244,20	23.870,48	102,72
3.	Nilai Produkt Perikanan	Rupiah	207.271.207.425	408.618.208.094,16	197,09%	406.128.333.000	303.646.434.870	74,79
4.	Pendapatan Nelayan	Rupiah	12.341.061	26.138.498,88	212,00%	14.250.000	14.127.040	99,12
5.	Tingkat Kesumatan Ikan	kg / kgpta/ Tahun	78,61	76,57	97,28%	54,25	70,11	129,07
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	1,70	3,60	126,67%	-	1,74	41,42
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	92,01	122,80%	90	64,34	71,48
8.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Indeks	1,25	0,61	48%	1,10	0,95	86,36



Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama tahun 2024 dengan tahun 2023. Dimana indikator kinerja utama tahun 2024 untuk Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 11,31 dari target 12,03 sehingga perbandingan capaiannya 94,01%. Produksi perikanan tahun 2024 terealisasi 27.625,41 ton dari target 26.151,54 ton dengan perbandingan capaian 105,64%. Nilai produksi perikanan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.409.616.208.936,36 dari target sebesar Rp.397.872.397.825 sehingga angka perbandingan capaian menjadi 102,95%. Pendapatan nelayan tahun 2024 dengan target sebesar Rp.19.561.082 dan terealisasi sebesar Rp. 20.138.456,68 dengan angka perbandingan capaian 102,95%. Tingkat konsumsi ikan tahun 2024 terealisasi 79,57 melebihi target 76,61 dengan angka perbandingan capaian 103,86%. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 terealisasi 3,69 dari target 2,70 dengan capaian 136,67%. Indeks profesionalitas ASN tahun 2024 target 75 dan terealisasi 92,01 dengan angka capaian 122,68%. Indeks sarana dan prasarana tahun 2024 terealisasi 0,85 dari target 1,25 dengan angka capaian 68%.

Sedangkan indikator kinerja utama tahun 2023 untuk kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 10,31 dari target 12,00 sehingga perbandingan capaiannya 85,91%. Untuk produksi perikanan dengan target 23.244,20 ton dan terealisasi 23.970,48 ton dengan perbandingan capaian 103,12%. Untuk nilai produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar Rp.359.844.434.872 dari target sebesar Rp.406.158.330.000 sehingga angka perbandingan capaian menjadi 88,59%. Untuk pendapatan nelayan dengan target sebesar Rp.16.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.157.940 dengan angka perbandingan capaian 87,12%. Tingkat konsumsi ikan terealisasi 70,15 melebihi target 56,25 dengan angka perbandingan capaian 124,7. Indeks kualitas pelayanan publik dengan target 4,20 dan terealisasi 1,74 lebih rendah dari target dengan perbandingan capaian 41,42%. Indeks profesionalitas ASN tidak mencapai target 90 hanya terealisasi 84,38 dengan angka perbandingan 93,75%. Indeks sarana dan prasarana terealisasi 0,85 dari target 2,20 dengan angka perbandingan 38,63%.

Selain itu dapat dijelaskan bahwa perbandingan dari 8 indikator kinerja utama anatar tahun 2024 dengan tahun 2023 hanya terdapat 1 indikator kinerja utama yang tidak terdapat pada tahun 2023 yakni indeks kepuasan masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan indikator kinerja



utama pada Renstra tahun 2018-2024 dengan Renstra tahun 2024-2026. Jika dilihat dari target dan realisasi antara indikator kinerja utama tahun 2024 dengan tahun 2023 terus mengalami kenaikan terkecuali hanya pada indeks sarana dan prasarana pelayanan publik tidak mengalami kenaikan karena disebabkan tidak terdapat penambahan sarana dan prasarana kantor.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Jangka Menengah Renstra
1.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	11,31	10,31	12,64
2.	Produksi perikanan	Ton	27.625,41	23.970,48	27.475,88
3.	Nilai Produksi Perikanan	Rupiah	409.616.208.936,36	359.844.434.872	418.014.687.964
4.	Pendapatan nelayan	Rupiah	20.138.456,68	14.157.940	20.551.362
5.	Tingkat konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun	79,57	70,15	80,48
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,69	-	2,9
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	92,01	84,38	78,58
8.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Indeks	0,85	0,85	1,74

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 untuk kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sebesar 11,31 dan 10,31 bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar 12,64 maka dapat dikatakan mengalami terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 pada produksi perikanan sebesar 27.625,41 ton dan 23.970,48 ton bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar 27.475,88 ton maka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun bahkan produksi perikanan tahun 2024 sudah melewati target yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 untuk nilai produksi perikanan sebesar Rp. 409.616.208.936,36 dan Rp. 359.844.434.872 bila dibandingkan dengan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar Rp. 418.014.687.964 maka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 untuk nilai pendapatan nelayan sebesar Rp. 20.138.456,68 dan Rp. 14.157.940 bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar Rp. 20.551.362 maka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 untuk nilai tingkat konsumsi ikan sebesar 79,57 kg/kapita/tahun dan 70,15 kg/kapita/tahun bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar 80,49 kg/kapita/tahun maka pencapaian kinerja mendekati target akhir periode renstra karena setiap mengalami kenaikan tingkat konsumsi ikan.

Untuk indikator kinerja utama Indeks kepuasan masyarakat hanya ada pada tahun 2024 sedangkan tahun 2023 belum ada penetapan indeks kepuasan masyarakat. Dari nilai yang dicapai sebesar 3,69 sudah melewati target akhir periode renstra sebesar 2,9.

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan 2023 untuk indeks profesionalitas ASN sebesar 92,01 dan 84,38 bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar 78,59 maka sudah melewati target yang ditetapkan.

Untuk pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 indeks sarana dan prasarana pelayanan publik sebesar 0,85 bila dibandingkan dengan terhadap target akhir periode Renstra perangkat daerah sebesar 1,74 maka belum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Grafik 3.1

Analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah





Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 indikator kinerja utama capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Hanya pada indikator indeks sarana dan prasarana tidak mengalami kenaikan. Rata – rata kenaikan Indikator kinerja utama tahun 2024 dan tahun 2023 mengalami kenaikan untuk mencapai dan bahkan melebihi target jangka menengah Renstra 2024-2026.

Indikator kinerja utama tahun 2024 yang telah mencapai dan melebihi angka 100% dari target jangka menengah Renstra 2024-2026 terdapat pada indikator produksi perikanan, nilai produksi, pendapatan nelayan, tingkat konsumsi ikan, indeks kepuasan masyarakat dan Indeks profesionalitas ASN. Indikator yang berada pada angka 80% dari target jangka menengah Renstra adalah indikator kontribusi perikanan terhadap PDRB. Indikator yang berada pada angka dibawah 50% dari target jangka menengah Renstra adalah indikator indeks sarana dan prasarana pelayanan publik.

Untuk tahun 2023 indikator kinerja utama yang berada pada angka 100% dari target jangka menengah Renstra adalah indikator Indeks profesionalitas ASN. Indikator kinerja utama yang berada pada angka diatas 80% dari target jangka menengah Renstra adalah indikator kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, produksi perikanan, nilai produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan. Indikator yang berada di bawah angka 80% adalah Indikator pendapatan nelayan. Indikator yang berada dibawah angka 50% adalah Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.4.
Analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
			IKU OPD (Tahun 2024)	Nasional (Tahun 2023)
1.	Produksi perikanan	Ton	27.625,41	24.737.618
2.	Tingkat konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun	79,57	57,61

Ada 2 indikator kinerja utama yang dapat dibandingkan dengan standar nasional dalam hal ini membandingkan dengan laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2023 adalah



produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan yang mana realisasi produksi perikanan secara Nasional tahun 2023 sebesar 24.737.618 ton lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja OPD tahun 2024 sebesar 27.625,41. Kemudian tingkat konsumsi ikan standar nasional untuk tahun 2023 sebesar 57,61 sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Sikka realisasi di tahun 2024 sebesar 79,57 ini berarti tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Sikka melampaui standar nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

Beberapa keberhasilan / kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang terjadi selama tahun anggaran 2024.

1. Keberhasilan atau peningkatan kinerja tahun 2024, antara lain :

- Dari 8 indikator kinerja terdapat 7 indikator kinerja yang mengalami peningkatan mendekati dan juga melebihi capaian target. Hal ini dipengaruhi oleh kolaborasi antara aktivitas nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan dan juga didukung oleh penyediaan sarana prasarana kegiatan penangkapan dari pemerintah.
- Semua kegiatan fisik pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran specific grand dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dianggarkan dalam DPA 2024 dan DPPA 2024 semua terlaksana dan terealisasi 100%
- Untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolahan berjalan sesuai dengan ketersediaan anggaran karena merupakan bagian dari anggaran specific grand.
- Kerjasama dengan Pelaku usaha di sektor perikanan terus mengalami peningkatan baik perorangan maupun yang berbadan hukum.

2. Kegagalan atau penurunan kinerja tahun 2024 antara lain :

- Indikator indeks sarana dan prasaran pelayanan publik tidak mengalami peningkatan dikarenakan tidak ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan yang menjadi aspek penilaian seperti layanan kebutuhan khusus, ruang laktasi/tempat bermain anak dan ruang fotocopy.



- Kegiatan yang bersumber pada anggaran block grand tidak semua dapat terlaksana.
 - Pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target yang ditetapkan yakni retribusi penjualan produk usaha daerah berupa penjualan es balok dari pabrik es Alok, Paga dan Nangahale karena operasional 3 pabrik es mengalami kerusakan.
 - SDM aparatur pada Dinas Perikanan masih terbatas karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan pelatihan teknis di bidang perikanan.
 - Pembinaan nelayan dan pembudidaya masih terbatas karena jumlah aparatur yang masih terbatas pula.
3. Alternative solusi terhadap kegagalan atau penurunan kinerja tahun 2024, antara lain :
- Berdasarkan beberapa kegagalan dan penurunan yang terjadi selama tahun 2024 dapat dilakukan alternatif solusi, antara lain :
- Penganggaran penyediaan sarana dan prasarana kegiatan perikanan untuk nelayan terus ditingkatkan.
 - Perbaiki mesin pabrik es sehingga dapat kembali dioperasikan untuk menghasilkan PAD dari retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - Mencari sumber anggaran dari pusat untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat membantu pelaku usaha di bidang perikanan.
 - Memberikan informasi peluang investasi kepada pelaku usaha di sektor perikanan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ada 2 sumberdaya yang dapat menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran. Kedua sumberdaya ini saling melengkapi untuk pencapaian indikator kinerja dari perangkat daerah. Sumberdaya manusia khususnya ASN di dinas perikanan berjumlah 31 orang belum secara optimal melakukan kegiatan pembinaan di semua desa pesisir. Untuk sumberdaya anggaran selama tahun 2024 sebesar Rp. 18.212.481.189,98 terealisasi sebesar Rp. 16.874.363.321 dengan capaian 92,65%.

Sumberdaya manusia khususnya ASN di dinas perikanan sudah melaksanakan kegiatan secara maksimal meskipun masih belum mencapai



kondisi yang optimal untuk mencapai semua indikator kinerja. Karena itu perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan baik itu kegiatan pelatihan penangkapan, kegiatan budidaya dan kegiatan pengolahan sehingga mampu mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada penerima manfaat di bidang perikanan.

Untuk sumberdaya anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 18.212.481.189,98 terealisasi sebesar Rp. 16.874.363.321 dengan capaian 92,65%. Dari sumberdaya anggaran ini, 60,59% atau sebesar Rp. 11.034.429.899 digunakan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang langsung diserahkan kepada nelayan dan pembudidaya ikan berupa sarana penangkapan dan budidaya ikan. Untuk kegiatan perikanan tangkap berupa bantuan kapal, alat tangkap, mesin kapal, cool box dengan nilai sebesar Rp. 10.725.031.499. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya berupa bantuan benih ikan, pakan ikan dan kolam pemeliharaan dengan nilai sebesar Rp. 309.398.400

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.5.

Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	a. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	a. Program pengelolaan perikanan tangkap	a. Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah	10.725.031.499
		b. Produksi perikanan	b. Program pengelolaan perikanan budidaya	b. Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	309.398.400
		c. Nilai produksi perikanan	c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	c. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	1.881.344.700
		d. Pendapatan nelayan			
		e. Tingkat konsumsi ikan			



2.	Meningkatnya profesionalitas ASN	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah		5.296.706.590,98	
		b.	Indeks Profesionalitas ASN		a.	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23.625.600
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	a.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	b.	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	2.891.428.979
					c.	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	211.851.000
					d.	Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.104.668.012
					e.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	65.133.000

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pencapaian 8 indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang menunjang untuk pencapaian kinerja tersebut. Dari 8 indikator kinerja terbagi menjadi 5 indikator kinerja didukung oleh 3 program dan 3 kegiatan. Sedangkan 3 indikator kinerja didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan.

Program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan langsung berkaitan dengan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan sehingga mendukung upaya pencapaian 5 indikator kinerja yakni kontribusi perikanan terhadap PDRB, produksi perikanan, nilai produksi perikanan, pendapatan nelayan dan tingkat konsumsi ikan.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah lebih terarah kepada sumberdaya ASN di dinas perikanan dalam hal pelayanan publik di bidang perikanan sehingga menunjang pencapaian 3 indikator kinerja yakni indeks kepuasan masyarakat, indeks profesionalitas ASN dan indeks sarana dan prasarana pelayanan publik



B. REALISASI ANGGARAN

Target pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 1.215.123.180 atau 40,50%. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk Dinas Perikanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 18.212.481.189,98 dengan realisasi mencapai Rp. 16.874.363.321 atau mencapai 92,65% dengan perincian :

1. Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja operasi tahun anggaran 2024 sebesar sebesar Rp. 16.617.669.189,98 dengan realisasi mencapai Rp. 15.343.003.392 atau mencapai 92,33% dengan perincian :

> Belanja pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.956.669.779 dengan realisasi mencapai Rp. 2.413.853.537, atau mencapai 81,64%

> Belanja barang dan jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 13.660.999.411 dengan realisasi mencapai Rp. 12.929.149.855 atau mencapai 94,64%

2. Belanja Modal

Anggaran belanja modal dinas perikanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.594.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.531.359.929, atau mencapai 96,02%

program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 4 program, 8 kegiatan dan 14 subkegiatan dengan rincian capaian belanja langsung dari masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.296.706.591	4.259.143.968	80,50
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.625.600	23.476.000	99,37
a.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.625.600	23.476.000	99,37
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.881.428.979	2.371.165.537	82,01
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.318.779	2.314.853.537	81,67
b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	57.109.200	56.312.000	98,60



Penjualan / Verifikasi Keuangan SKPD				
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.851.000	138.943.666	65,59
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.922.900	19.675.600	98,76
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cerakan dan Penggandaan	17.403.200	17.275.000	99,26
c.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.525.000	101.992.886	58,44
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.104.568.012	1.711.860.498	81,34
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.079.003.222	699.769.608	64,85
b.	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.982.500	2.940.000	98,58
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.582.290	1.009.170.590	98,68
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.133.000	23.678.277	36,35
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.186.700	22.693.277	37,42
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.946.300	785.000	19,89
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.725.031.499	10.591.739.194	98,76
1.	Kegiatan Pembertayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	10.725.031.499	10.591.739.194	98,76
a.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	10.725.031.499	10.591.739.194	98,76
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDAYA	309.398.400	306.678.300	99,12
1.	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	309.398.400	306.678.300	99,12
a.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	309.398.400	306.678.300	99,12
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.881.344.700	1.706.801.829	90,72
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyauran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.881.344.700	1.706.801.829	90,72
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.881.344.700	1.706.801.829	90,72
TOTAL		18.212.481.189,96	16.674.363.321	92,65

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.296.706.591 terealisasi sebesar Rp. 4.269.143.998 dengan tingkat pencapaian 80,60%

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.23.625.600 terealisasi sebesar Rp. 23.476.000 dengan tingkat pencapaian 99,37%



- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.19.680.000 terealisasi sebesar Rp. 23.625.600 terealisasi sebesar Rp. 23.476.000 dengan tingkat pencapaian 99,37%. Hasil yang dicapai Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan.
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.891.428.979 terealisasi sebesar Rp. 2.371.165.537 dengan tingkat pencapaian 82,01%
 - Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.834.319.779 terealisasi sebesar Rp. 2.314.853.537 dengan tingkat pencapaian 81,67%. Hasil yang dicapai berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Perikanan selama 12 bulan.
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.109.200 terealisasi sebesar Rp. 56.312.000 dengan tingkat pencapaian 98,60%. Hasil yang dicapai berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan dan lembur.
- c. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 211.851.000 terealisasi sebesar Rp. 138.943.686 dengan tingkat pencapaian 65,59%
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.922.800 terealisasi sebesar Rp. 19.675.800 dengan tingkat pencapaian 98,76%. Capaian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan alat tulis kantor dinas perikanan selama 12 bulan.



- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.403.200 terealisasi sebesar Rp. 17.275.000 dengan tingkat pencapaian 99,26%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa cetak dan penggandaan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas perikanan.
- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 174.525.000 terealisasi sebesar Rp. 101.992.886 dengan tingkat pencapaian 58,44%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa perjalanan dinas luar dan daerah dalam rangka pembinaan, koordinasi dan monitoring kegiatan perikanan.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.104.668.012 terealisasi sebesar Rp. 1.711.880.498 dengan tingkat pencapaian 81,34%
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.079.003.222 terealisasi sebesar Rp. 669.769.808 dengan tingkat pencapaian 64,85%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran rekening air, pembelian token listrik kantor dan pembayaran internet/Wi-Fi dinas perikanan.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dengan alokasi dana Rp. 2.982.500 teralisasi sebesar Rp.2.940.000 dengan tingkat pencapaian 98,58%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan alat dan barang kebersihan kantor.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.022.682.290 terealisasi sebesar Rp. 1.009.170.690 dengan tingkat pencapaian 98,68%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran honorarium tenaga honorer sebanyak 40 orang.



e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.65.133.000 terealisasi sebesar Rp.23.678.277 dengan tingkat pencapaian 36,35%

➤ Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Alokasi dana sebesar Rp. 61.186.700 terealisasi sebesar Rp. 22.893.277 dengan tingkat pencapaian 37,42%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional, belanja suku cadang kendaraan dan belanja pajak kendaraan.

➤ Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.946.300 terealisasi sebesar Rp. 785.000 dengan tingkat pencapaian 19,89%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan alat kantor berupa pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/laptop dan pemeliharaan printer.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

program pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.725.031.49 terealisasi sebesar Rp. 10.591.739.194 dengan tingkat pencapaian 98,76%

a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.725.031.49 terealisasi sebesar Rp. 10.591.739.194 dengan tingkat pencapaian 98,76%.

➤ Sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.725.031.49 terealisasi sebesar Rp. 10.591.739.194 dengan tingkat pencapaian 98,76%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap berupa pembangunan kapal perikanan, pengadaan mesin kapal, pengadaan alat tangkap



3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.881.344.700 terealisasi sebesar Rp. 1.706.801.829 dengan tingkat pencapaian 90,72%

a. kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota

kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.881.344.700 terealisasi sebesar Rp. 1.706.801.829 dengan tingkat pencapaian 90,72%

- Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.881.344.700 terealisasi sebesar Rp. 1.706.801.829 dengan tingkat pencapaian 90,72% Kegiatan yang dilaksanakan berupa biaya operasional kegiatan 3 pabrik es yakni pabrik es di TPI Alok, pabrik es di Nangahale dan pabrik es di Paga.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

program pengelolaan perikanan budidaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.398.400 terealisasi sebesar Rp. 306.678.300 dengan tingkat pencapaian 99,12%

a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.398.400 terealisasi sebesar Rp. 306.678.300 dengan tingkat pencapaian 99,12%

- Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.398.400 terealisasi sebesar Rp. 306.678.300 dengan tingkat pencapaian 99,12%



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya (DPPA) selama kurun waktu satu tahun.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka tahun 2024 berisi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, selain itu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Sikka di tahun mendatang. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil atas kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan selama tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terealisasi sebesar 11,31 dari target 12,03 sehingga perbandingan capaiannya 94,01%.
2. Produksi perikanan dengan target 26.151,54 ton dan terealisasi 27.625,41 ton dengan perbandingan capaian 105,64%.
3. Nilai produksi perikanan terealisasi sebesar Rp. 409.616.208.936,36 dari target sebesar Rp. 397.872.397.825 sehingga angka perbandingan capaian menjadi 102,95%.
4. Pendapatan Nelayan dengan target sebesar Rp. 19.561.082 dan terealisasi sebesar Rp. 20.138.456,68 dengan angka perbandingan capaian 102,95%.
5. Tingkat konsumsi ikan terealisasi 79,57 melebihi target 76,61 dengan angka perbandingan capaian 103,86%.
6. Indeks kepuasan masyarakat dengan target 2,70 dan terealisasi 3,69 lebih rendah dari target dengan perbandingan capaian 136,67%
7. Indeks profesionalitas ASN target 75 terealisasi 92,01 dengan angka perbandingan capaian 122,68%.



8. Indeks sarana dan prasarana terealisasi 0,85 dari target 1,25 dengan angka perbandingan capaian 68%.
9. Target pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 1.215.123.180 dengan capaian 40,50 %
10. Alokasi anggaran belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 18.212.481.189,98 dengan realisasi mencapai Rp. 16.874.363.321 atau mencapai 92,65%

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan adalah :

1. Peningkatan indeks sarana dan prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.
2. Pengadaan mesin pabrik es yang baru untuk mengganti mesin pabrik es lama sehingga berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di sektor perikanan terutama untuk pelatihan teknis penangkapan, pengolahan dan budidaya ikan.

Maumere, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sikka,



Paulus H. Bangkur, S.PI, M.PI

Paulus H. Bangkur, S.PI, M.PI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660628 199703 1 005